



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No. 2 Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TERNATE

NOMOR : 503/20/KEP/DPMPPTSP-KT/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TERNATE

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Surat Walikota Ternate Nomor 050.13/210/2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2021;
- b. Bahwa untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMPPTSP tentang Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI 2021-2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE**
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) periode sebelumnya;
 2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 3. Menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
 4. Melakukan pembahasan identifikasi, isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 5. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan dinas;
 6. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP;
 8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Walikota kepada kepala dinas;
 9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran;
 10. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis DPMPTSP 2021-2026
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 17 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Perayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Ternate (sebagai laporan) di Ternate
2. Inspektur Kota Ternate di Ternate
3. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate di Ternate
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Ternate di Ternate
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate di Ternate

Lampiran SK

Nomor : 503/20/KEP/DPMPPTSP-KT/2021

Tanggal : 17 November 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENSTRA 2021-2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TERNATE

NO	KEDUDUAKN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Drs. Bahtiar Teng
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	Nuryani Amra, S.STP, M.Si
3.	Anggota	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi PM	Gazali Abdurrahman, SE
		Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Samsudin Sibua, S.IP. ME
		Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan	Abdul Hamid M, SE, MM
		Kepala Bidang Penanaman Modal	Suryaningsi, SE, M.Si
		Kasubag Perencanaan	Rosita Rawung

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate



Bahtiar Teng
Drs. BAHTIAR TENG
Perencana Utama Muda
Nip. 19660502 199203 1 016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi, selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan lima tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana program dan kegiatan pelayanan perangkat.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Ternate, 25 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate



Drs. BAHTIAR TENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199203 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA TERNATE	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya DPMPTSP.....	8
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.....	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DPMPTSP	
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	13
3.2 Telaahan Visi, MISI DAN Program Walikota dan Wakil Walikota	15
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi.....	16
3.4 Telaahan RTRW/KHLS.....	19
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategi.....	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR	
 KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN	
 INDIKATIF	27
BAB VII INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA	
 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
BAB VIII PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BABI

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang terjadi. RPJMD menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan beserta alokasi pendanaannya. RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021- 2026.

Renstra-PD Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kota Ternate dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan yaitu pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi terlihat pada struktur lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Kondisi ini tidak terlepas dari posisi geografis Kota Ternate yang berada merupakan kota kepulauan dan salah satu simpul strategis sebagai pintu gerbang provinsi Maluku Utara.

Investasi yang tertanam di Kota Ternate selama periode 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan (terutama dari tahun 2017 sampai tahun 2020). Pada tahun 2017, tercatat investasi yang tertanam di Kota Ternate sebesar Rp 113.532.000.000,-, yang berasal dari PMDN. Pada tahun 2020, investasi meningkat menjadi Rp 167.967.900.010,- dari target sebesar 50 Milyar. Berarti dalam periode ini terjadi lonjakan nilai Investasi di Kota Ternate, hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa pada periode ini Kota Ternate merupakan wilayah yang sangat menjanjikan untuk melakukan Investasi.

Pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026 menargetkan Nilai Investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 167.000.000.000,- hal ini mengingat perkembangan investasi erat kaitannya dengan pengaruh perkembangan investasi itu sendiri sehingga target pada tahun 2021 lebih besar dari target tahun lalu dengan pertimbangan jumlah nilai

investasi yang tidak terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan besar akan tetapi termasuk juga investasi modal kecil sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Untuk mendukung keberhasilan RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 pada misi ke 1 (satu) yaitu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi kontributor sektor ekonomi terhadap pembangunan Daerah terhadap sasaran meningkatnya kemudahan investasi, misi 3 (tiga) yaitu meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik terhadap sasaran indeks kepuasan masyarakat serta misi 5 (lima) yaitu setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi. Meningkatkan kemampuan maka dalam mengimplementasikan Program dan Sasarannya disusunlah program dan kegiatan pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Ternate. Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam pencapaian kinerja sasaran yang diimplementasikan melalui program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1.2.1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
- 1.2.4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 1.2.5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- 1.2.7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangak Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 1.2.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Ternate Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);

- 1.2.13 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154)
- 1.2.14 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
- 1.2.14 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210)

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026 yaitu :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha di Kota Ternate;
- b) Sebagai penjabaran implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2021-2026 Dalam Misi ke 1 yaitu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional pada sektor Penanaman Modal Kota Ternate;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, yaitu :

- 1) Membantu seluruh jajaran petugas/aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan berusaha di Kota Ternate;
- 2) Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan perizinan berusaha di Kota Ternate;

- 3) Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan berusaha di Kota Ternate pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun lima tahun kedepan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan		Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah		Menjelaskan Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, meliputi: tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan;
BAB III	Isu-isu berdasarkan Tugas dan Fungsi	Strategis	Membahas Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. Pada Bab ini dipaparkan permasalahan penentuan isu-isu strategis
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran		Dijelaskan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
BAB V	Strategi Dan Kebijakan		Dijelaskan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan		Menguraikan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari strategi kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;

BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	Menjelaskan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KotaTernate;
BAB VIII		Penutup

BAB II**GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSP****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate**

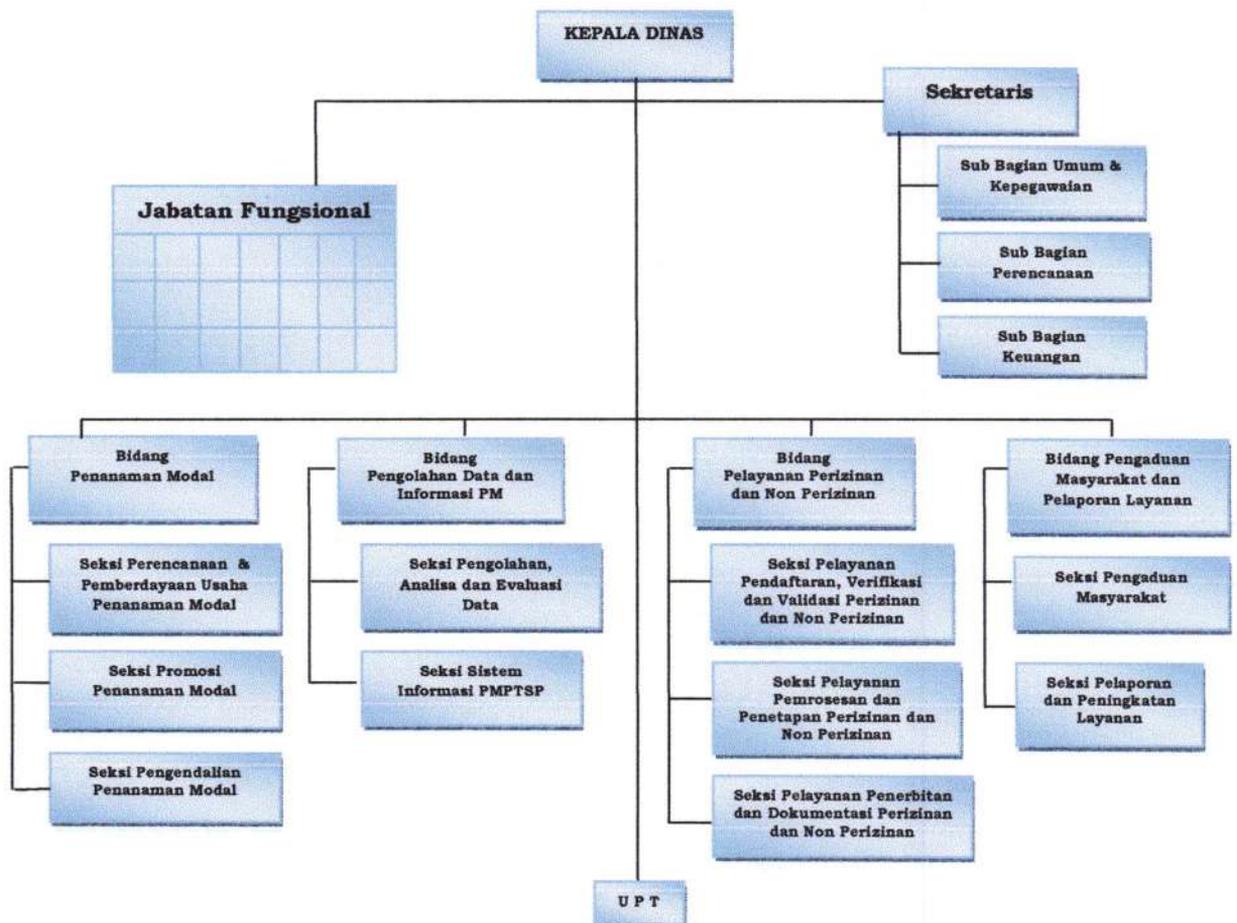
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 4.B Tahun 2021. Adapun tugas **melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu**. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate mempunyai fungsi **Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi Investasi, Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan
 - b. Seksi Pelayanan Pemrosesan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan

- c. Seksi Pelayanan Penerbitan dan Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan
- (5) Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 - a. Seksi Pengolahan, Analisa dan Evaluasi Data
 - b. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP
- (6) Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
 - a. Seksi Pengaduan Masyarakat
 - b. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate



2.2 Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate

a. Kondisi sumberdaya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate

Kondisi dan potensi yang ada di DPMPTSP Kota Ternate merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Ternate urusan Penanaman Modal, adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain:

Tabel I
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon IIb	1	
2	Eselon IIIa	1	
3	Eselon IIIb	4	
4	Eselon IVa	13	
	Jumlah	19	

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Sampai Bulan Agustus 2021

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagian besar berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme berencana.

Tabel II
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Per 1 Juli 2021

No	Nama Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	6
3	III	25
4	IV	9
	Jumlah	40

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Sampai Bulan Agustus 2021

Tabel III
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Per 1 Juli 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	-
2	SMU/SMK	8
3	D3	2
4	S1	23
5	S2	7
6	S3	-
	Total	40

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Sampai Bulan Agustus 2021

Sistem jaringan informasi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate bisa diakses melalui website www.dpmptsp.ternatekota.go.id. Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ternate yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik.

b. Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor
2. Ruang Pelayanan, Ruang Tunggu dan Ruang Rapat
3. Kendaraan Bermotor (4 unit roda 2)
4. Peralatan Elektronik (PC 18 unit, Laptop 5 unit, Printer 23 unit, Mesin antrian 1 unit, Server 2 unit)
5. Meja kursi

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.1 Kinerja Penanaman Modal

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan dan Non Perizinan).

Berdasarkan capaian Kinerja dari Renstra 2016 s.d 2020, dapat dilihat adanya peningkatan realisasi Investasi dari capaian tahunan walaupun ada sedikit

mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019, yaitu pada tahun 2017 Rp 113.532.000.000, tahun 2018 Rp 88.441.667.117, tahun 2019 Rp 85.731.616.000, tahun 2020 Rp 167.967.900.010, .

2.3.2 Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Berdasarkan capaian Renstra 2016-2021 pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai Perwali nomor I.A tahun 2020 tentang Pendelegasian kewenangan terdapat 89 jenis kewenangan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kota Ternate. Terhadap kinerja dari 89 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan. Serta tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan dan tindaklanjut pengaduan yang diterima

TABEL T-C 23 Dalam Permendagri 86 Tahun 2017)

Tabel 2.3

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KOTA TERNATE
TAHUN 2016-2021**

Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Indikator sasaran																		
IKM Pelayanan Perizinan	-	-	-	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Persentase Izin Yang Diterbitkan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan yang ditindaklanjuti	-	-	-	n/a	30	20	15	10	-	40	10	6	15	-	133%	50%	40%	150%
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	n/a	5	8	8	10	-	1	10	21	16	-	0.2%	1.25%	2.63%	1.6%
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMD)	-	-	-	n/a	50M	50M	50M	50M	-	113,5M	88.4M	85.7M	167.9M	-	2.27%	1.7%	1.7%	3.3%

2.4 Kinerja Keuangan DPMPTSP Selama Lima Tahun

Anggaran dan Pendanaan DPMPTSP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

(Tabel T-C 24 dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tabel 2.4
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	3.582.725,143	3.341.983,900	2.788.327,009	4.558.888,752	1.704.567,016	3.582.725,143	3.266.739,553	2.532.382,677	4.516.106,087	1.410.836,872	100	97	90	99	83	-41%	-46%
Belanja Tidak Langsung	790.355,843	2.388.160,089	2.986.056,000	2.250.635,100	4.081.973,436	790.355,843	2.290.298,835	2.964.616,931	2.202.381,902	3.984.318,013	100	96	99	98	98	121%	119%
Total	4,373,080,986	5,730,143,989	5,774,383,009	6,809,523,852	5,786,540,452	4,373,080,986	5,557,038,388	5,496,999,608	6,718,487,989	5,395,154,885	100%	98%	91%	99%	85%	40%	37%

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal

Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah Kota yang memiliki luas wilayah 5.709,72 km² dengan jumlah penduduk 205.001 jiwa dengan potensi unggulan pada sektor primer (Tanaman Pangan dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan,), sektor sekunder (Industri Makanan) dan sektor tersier (Listrik, gas dan air, Kontruksi, Perdagangan dan reparasi, Hotel dan retoran, Tranportasi, gudang & komunikasi, Perumahan, Perkantoran, Jasa lainnya) yang tersebar pada 4 Kecamatan. Sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kota Ternate. Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Ternate antara lain:

- Melaksanakan Promosi peluang investasi potensi unggulan Kota Ternate di dalam dan luar Negeri;
- Optimalisasi Pelayanan Perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate pada kondisi saat ini adalah:

1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan;
2. Respon dari Dinas/Instansi terkait masih lemah;
3. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses pelayanan perizinan berusaha;
4. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
5. Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan arahan RTRW (Zona kawasan industri)

Peluang:

1. Adanya program dan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan informasi peluang investasi;
2. Dengan adanya kegiatan pengendalian dan pengawasan dapat memberikan pelayanan dan pembinaan penanaman modal sehingga diharapkan terciptanya iklim investasi yang kondusif;
3. Terdapat potensi subjek dan objek perizinan yang belum memiliki izin dalam lingkungan masyarakat;
4. Adanya keinginan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan perizinan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGI****DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP**

Berdasarkan Perpres RI nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan Perwali Nomor 1.A tahun 2020 tentang Perubahan ketiga aras Peraturan Walikota Ternate nomor 4 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan Walikota kepada penyelenggara PTSP sebanyak 94 jenis Pelayanan. Perwali tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan Isu Strategis sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ternate. Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan norma, standar, prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Penanaman Modal yang ditetapkan dalam perka BKPM RI No. 14 Tahun 2014, yang meliputi: 1). Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama Penanaman Modal 3). Promosi Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman Modal 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6). Pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal dan 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: 1). Pelaksanaan Pelayanan, 2). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 3). Pengelolaan Informasi 4). Pengawasan Internal 5). Penyuluhan Kepada Masyarakat dan 6). Pelayanan Konsultasi.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate**

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Faktor Yang Mempengaruhi
1. Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Penanaman Modal belum memenuhi Standar Target ▪ Pelayanan Administrasi Perizinan belum memenuhi standar target 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, standar pelayanan ❖ Data peluang investasi masih belum up to date ❖ SOP dan SP masih belum up to date sesuai dengan jenis izin ❖ Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya ❖ Kurangnya komitmen antara perangkat daerah teknis pada proses pelayanan
2. Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan perizinan masih belum berjalan dengan baik ▪ Database dan aplikasi perizinan ▪ Sarana penunjang promosi investasi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan dengan DPMPTSP ❖ Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis
3. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum memenuhi target ▪ Monev pelayanan perizinan terpadu belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal
4. Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terbatas kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum meratanya kompetensi SDM aparatur penanaman modal dan PTSP

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Ternate secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kota Ternate yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”

- TERNATE ANDALAN –

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pembangunan di Kota Ternate mempunyai konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan saling mempengaruhi. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, hukum politik maupun sosial budaya. Upaya membangun tanpa diskriminasi, setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan hukum, serta mampu memberikan perlindungan masyarakat yang kurang mampu dan memberikan ruang tumbuh kembangnya budaya masyarakat. Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 8 (delapan) misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari TERNATE ANDALAN yaitu:

1. Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif;
3. Meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas;
4. Menumbuh kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai kearifan lokal (adat seatorang);
5. Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berekonomi;
6. Setiap warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan sarana dan prasarana perkotaan;
7. Daerah melindungi masyarakat yang kurang mampu;
8. Daerah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate menyelaraskan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 1 (satu) “ **Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional**”, Misi 3 (tiga) “**Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik**” pada sektor investasi serta Misi (Lima) “**Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kewajiban Yang Sama Dalam Berekonomi**”. Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian intern dalam pelayanan publik dan menciptakan lapangan kerja di Kota Ternate sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah dengan sasaran meningkatkan kemudahan investasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate merumuskan Rencana Strategis lima tahun kedepan sebagai berikut:

- Pengembangan sistem informasi investasi
- Perumusan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi
- Peningkatan pelayanan perizinan berusaha
- Peningkatan peluang potensi investasi
- Peningkatan kapasitas aparatur (SDM)

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra SKPD Provinsi Maluku Utara

3.3.1 Renstra BKPM Tahun 2020-2024

Sesuai dengan arahan Presiden terpilih periode 2020-2024, dukungan BKPM dalam pencapaian visi Presiden yaitu sebagai berikut:

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegrasi Dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong – Royong”

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi serta mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan Renstra BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal;

2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan tujuan BKPM maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani

Arah kebijakan pertama adalah Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, adapun strategi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*)
2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal
4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
5. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Arah kebijakan kedua adalah Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adapun strategi yang akan dicapai adalah:

1. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
2. Mendorong peningkatan produktifitas penanaman modal
3. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
4. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar
5. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
6. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar

7. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

3.3.2 Renstra DPMPTSP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

DPMPTSP Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Renstra tahun 2019-2024 mempunyai tujuan didalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Maluku Utara adalah Meningkatkan Investasi Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara lain;

1. Meningkatnya minat investasi;
2. Meningkatnya realisasi investasi;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Renstra DPMPTSP Provinsi Maluku Utara diperlukan tentang rumusan strategi dan arah kebijakan antara lain :

a. Sasaran 1:

Meningkatnya minat investasi

Strategi yang dilakukan :

- Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi
- Mengembangkan potensi unggulan daerah
- Memberikan kemudahan berinvestasi di Maluku Utara

b. Sasaran 2 :

Meningkatnya realisasi investasi

Strategi yang dilakukan :

- Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal
- Meningkatnya jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban penyampaian LKPM

c. Sasaran 3 :

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Strategi yang dilakukan :

- Menciptakan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan
- Meningkatkan sinergitas dengan OPD teknis
- Meningkatkan kualitas aparatur PTSP
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam rangka mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima sangat berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat merupakan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas tertentu untuk memperoleh legalitas dari pejabat negara sebagai suatu alat administrasi haruslah memiliki perizinan yang merupakan legalitas dalam melakukan usahanya.

Dalam melakukan usahanya tidak boleh bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Peningkatan investasi suatu daerah sangat berkaitan dengan penerbitan perizinan yang merupakan legalitas dalam melakukan usahanya. Perizinan berdampak pada pemanfaatan ruang dan lahan harus ditinjau dari implikasi telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS). Dibanding dengan struktur dan pola eksisting maka DPMPTSP dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas kebutuhan pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program dan targetnya dapat disusun sesuai RTRW Kota Ternate.

RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Ternate. RTRW menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dan atau masyarakat;
6. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
7. Penataan ruang strategis Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan tata ruang wilayah Kota Ternate sebagai basis tanaman pangan regional, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang

berdaya saing dan memperhatikan kelanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan.

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) Kota Ternate yang berkaitan dengan dinas adalah akses permodalan, pengembangan dan peluang usaha yang masih kurang dan belum optimal serta permasalahan kerjasama antara daerah dan dunia usaha.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- a) Peluang potensi investasi belum termanfaatkan secara optimal;
- b) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan perizinan berusaha;
- c) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- d) Promosi potensi investasi kepada investor belum optimal;
- e) Kapasitas aparatur pada DPMPTSP masih belum optimal;
- f) Belum memiliki peraturan daerah tentang penanaman modal;
- g) Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- h) Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja DPMPTSP Kota Ternate. Tujuan dan sasaran harus dapat diukur. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Dan Penanaman Modal Di Kota Ternate**. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi 1 dan 3 RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota adalah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Ternate dan Meningkatkan Nilai Investasi di Kota Ternate.

Selanjutnya lebih mudah memperoleh gambaran keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat matriks keterkaitan antara RPJMD Kota Ternate dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, sebagaimana tertuang dalam tabel:

(Tabel T-C 25 dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tabel 4.1
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan nonperizinan serta daya saing daerah dalam mendukung iklim investasi daerah	Meningkatnya percepatan penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha	B	B	B	B	A	A
		Meningkatkan Daya Saing daerah dalam	Nilai Realisasi Investasi	168.000.000,000	184.800.000,000	203.280.000,000	223.608.000,000	245.968.800,000	270.565.680,000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mendukung investasi							
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	5	7	9	12	15	20

Sedangkan tujuan dan sasaran tersebut diatas selanjutnya diarahkan dalam pencapaiannya dengan beberapa indikator kinerja, sebagaimana pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi: “Mewujudkan Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan”

No	Misi	Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5	6
1.	Misi 1: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan nonperizinan serta daya saing daerah dalam mendukung iklim investasi daerah Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya percepatan penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha
2.	Misi 3: Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pelayanan Publik		Meningkatkan Daya Saing daerah dalam mendukung investasi	Nilai Realisasi Investasi
3.	Misi 5: Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi	Menciptakan Lapangan Kerja		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan (Mal Pelayanan Publik)
2. Peningkatan promosi investasi (intensitas promosi, diversifikasi media)
3. Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal
4. Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan
5. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website
6. Mempermudah investor untuk berinvestasi di Kota Ternate sesuai dengan potensi
7. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berusaha di Kota Ternate
8. Memberikan fasilitasi bagi para penanaman modal di Kota Ternate
9. Kenaikan nilai realisasi investasi
10. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
11. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

5.2 Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dalam kurun waktu 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan promosi Investasi
Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah. (diversifikasi media, intensitas promosi)
2. Penyempurnaan regulasi
3. Peningkatan pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal
Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut

4. Peningkatan SDM pelayanan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Rencana pembangunan mal pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi, diharapkan dengan penggunaan teknologi informasi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

7. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

8. Tercapainya penurunan tingkat pengangguran

(Tabel T-C 26 dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :			
“Mewujudkan Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan” TERNATE ANDALAN			
Misi 1 :			
“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Dan Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah Investor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan promosi investasi (intensitas promosi, diversifikasi media) 2. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website 3. Memperkuat data peluang investasi 	Peningkatan promosi Investasi Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.(diversifikasi

		yang prospektif untuk dikembangkan	media, intensitas promosi)
		4. Mempermudah investor untuk berinvestasi di Kota Ternate sesuai dengan potensi	

Visi :

“ Mewujudkan Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan” TERNATE ANDALAN

Misi 3 :

“Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Dan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Peningkatan sarana dan prasaran pelayanan perizinan (Mal Pelayanan Publik)	1. Penyempurnaan regulasi 2. Peningkatan pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal (Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut) 3. Peningkatan SDM pelayanan (Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal)
		2. Mengembangkan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal	
		3. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berusaha di Kota Ternate	

--	--	--	--

Visi :

“ Mewujudkan Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan” TERNATE ANDALAN

Misi 5 :

“Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Ketersediaan Lapangan Kerja	1. Meningkatnya Investasi dan Penanaman Modal	1. Kenaikan Nilai realisasi Investasi 2. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja. 3. Tercapainya penurunan tingkat pengangguran
		2. Pembukaan akses lapangan kerja dan investasi	

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

(Tabel T-C 27 dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
Tahun 2021-2026**

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Misi 1: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional													
B	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Serta Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Iklim Investasi Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka													
C	Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Investasi	Nilai Realisasi Investasi	168 M		184,8 M		203,2 M		223,6 M		245,9 M		270,5 M	
1.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal	50	350,000,000	50	400,000,000	55	450,000,000	60	500,000,000	65	500,000,000	75	500,000,000
1.1	Penyelenggaraan	Persentase												

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	minat investasi												
1.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah FGD yang dilaksanakan dan laporan strategis promosi penanaman modal	1 Kali & 1 Lap	50,000,000	1 Kali & 1 Lap	50,000,000	1 Kali & 1 Lap	50,000,000	1 Kali & 1 Lap	100,000,000	1 Kali & 1 Lap	100,000,000	1 Kali & 1 Lap	100,000,000
1.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran pada Kegiatan PM	1 Kali	300,000,000	1 Kali	350,000,000	2 Kali	400,000,000						
2.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi & Persentase Permasalahan Yang Dihadapi Pelaku Usaha	80%	470,000,000	82%	479,000,000	85%	487,000,000	87%	495,000,000	90%	525,000,000	100%	580,000,000
2.1	Pengendalian Pelaksanaan	Fasilitasi Permasalah	12											

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	han Yang Dihadapi Perusahaan												
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Proyek dan Nilai Invsetasi	12	100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memahami LKPM	25	270,000,000		279,000,000		287,000,000		295,000,000		325,000,000		380,000,000
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Monitoring PM	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000
A	Misi 3: Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas													
B	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Serta Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Iklim	IKM												

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Investasi Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka													
C	Sasaran 1 (Satu): Meningkatkan Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha	3,5 dari skala 4											
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	70,5	350.000.000	75,5	400.000.000	81,25	420.000.000	81,26	450.000.000	85,5	470.000.000	100	500.000.000
1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Rakor Tim Teknis Yang Dilaksanakan dan SP/SOP	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000

RENSTRA DPMP TSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	elektronik	yang Disusun												
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan Komitmen Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	70.000.000	1 Lap	70.000.000	1 Lap	70.000.000	1 Lap	100.000.000
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	1. Jumlah Responden SKM 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 3. Jumlah waktu Layanan Konsultasi dan informasi	300 responden & 75% pengaduan & 12 bulan	150.000.000	300 responden & 75% pengaduan	200.000.000	300 responden & 80% pengaduan	200.000.000	300 responden & 85% pengaduan	230.000.000	300 responden & 85% pengaduan	250.000.000	300 responden & 100% pengaduan	250.000.000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	Jumlah laporan evaluasi penetapan												

RENSTRA DPMPPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		fasilitasi/in sentif daerah												
2.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan	2 Data	250,000,000	2 Data	350,000,000	2 Data	400,000,000	2 Data	450,000,000	2 Data	450,000,000	2 Data	500,000,000
2.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Perkembangan Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan	75	250,000,000	80	350,000,000	85	400,000,000	90	450,000,000	95	450,000,000	100	500,000,000
2.1.2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Yang Dihasilkan dari Layanan Perizinan dan Nonperizinan	3 Data	250,000,000	3 Data	350,000,000	3 Data	400,000,000	3 Data	450,000,000	3 Data	450,000,000	3 Data	500,000,000
A	Misi 3:													

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas													
B	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Serta Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Iklim Investasi Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka													
C	Sasaran : Meningkatnya Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	IKM Pelayanan Perizinan	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD	80%	5.943.194.676	82%	7.095.694.676	85%	8.208.194.676	87%	9.315.944.676	90%	10.423.194.676	100%	11.530.694.678
3.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan PD (%)	80%		82%		85%		87%		90%		100%	

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan PD	3 dok	24.999.980	3 dok	50.000.000	3 dok	85.000.000	3 dok	100.000.000	3 dok	125.000.000	3 dok	150.000.000
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Yang Disusun	12 Kali & 4 dokumen	10.000.000	12 Kali & 4 dokumen	17.100.000	12 Kali & 4 dokumen	50.000.000	12 Kali & 4 dokumen	75.000.000	12 Kali & 4 dokumen	100.000.000	12 Kali & 4 dokumen	125.000.000
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran PD (%)	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN selama Setahun (Bulan)	12 Bulan	4.693.194.676	12 Bulan	4.693.194.678								
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian PD	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
3.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian	50Stel	67.760.000	70Stel	80.000.000	70Stel	150.000.000	100Stel	225.000.000	100Stel	300.000.000	100Stel	375.000.000

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Dinas												
3.3.	Monitorig, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah SKP yang tepat sasaran		-	30 SKP	25.000.000	45 SKP	70.000.000	50SKP	75.000.000	50 SKP	85.000.000	60 SKP	95.000.000
3.3.	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sertifikat Yang Diperoleh	40 Org	199.998.100	50 Org	230.998.100	60 Org	300.998.100	70 Org	500.998.100	80 Org	723.248.100	85 Org	750.000.000
3.3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Dilaksanakan/Diikuti	1 Kali	66.064.150	1 Kali	80.000.000	1 Kali	120.000.000	2 Kali	200.000.000	2 Kali	300.000.000	2 Kali	350.000.000
3.3.	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek	1 org	24.980.000	2 Org	50.000.000	3 Org	75.000.000	4 Org	100.000.000	5 Org	135.000.000	5 Org	200.000.000
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum PD	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
3.4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instlasi Listrik	10 Komponen	4.998.620	20 Komponen	10.000.000	30 Komponen	20.000.000	35 Komponen	30.000.000	35 Komponen	30.000.000	40 Komponen	50.000.000

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Yang Dibutuhkan												
3.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibutuhkan	10 Peralatan	4.999.500	20 Peralatan	10.000.000	30 Peralatan	15.000.000	35 Peralatan	20.000.000	35 Peralatan	30.000.000	50 Peralatan	100.000.000
3.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	7.875.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	100.000.000
3.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	104.734.800	3 Jenis	50.000.000	5 Jenis	110.000.000	10 Jenis	245.000.000	10 Jenis	350.000.000	10 Jenis	375.000.000
3.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/koran, majalah dan Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan	2 Jenis	4.950.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	15.000.000	2 Jenis	20.000.000	2 Jenis	20.000.000	2 Jenis	50.000.000
3.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan	12 Bulan	224.981.000	12 Bulan	309.401.900	12 Bulan	448.401.900	12 Bulan	600.401.900	12 Bulan	670.401.900	12 Bulan	700.000.000

RENSTRA DPMPSTP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Konsultasi												
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
3.5.1	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Jenis	99.686.400	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	200.000.000						
3.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang diperlukan	3 Jenis	248.583.885	3 Jenis	270.000.000	3 Jenis	380.600.000	3 Jenis	446.350.000	3 Jenis	480.350.000	3 Jenis	496.350.000
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang urusan PD	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
3.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	12 bulan	2.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000
3.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Internet, Rekening PDAM dan rekening	12 bulan	-	12 bulan	130.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	450.000.000	12 bulan	500.000.000

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Listrik (Bulan)												
3.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	99.999.513	12 bulan	150.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	360.000.000	12 bulan	450.000.000	12 bulan	460.000.000
3.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Gaji PTT dan Honor Lainnya Selama Setahun (Bulan)	12 Bln	545.350.000	12 Bln	590.000.000	12 Bln	700.000.000	12 Bln	730.000.000	12 Bln	800.000.000	12 Bln	825.000.000
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan PD	80%		82%		85%		87%		90%		100%	
3.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Kantor Yang Memperoleh Perawatan	1 Thn	49.991.600	1 Thn	65.000.000	1 Thn	75.000.000	1 Thn	120.000.000	1 Thn	120.000.000	1 Thn	150.000.000
3.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan	1 Thn	4.750.000	1 Thn	10.000.000	1 Thn	30.000.000	1 Thn	75.000.000	1 Thn	80.000.000	1 Thn	150.000.000

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dan Mesin Lainnya												
3.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Bangunan	2.203.703.208	1 Bangunan	100.000.000	1 Bangunan	100.000.000	1 Bangunan	150.000.000	1 Bangunan	261.000.000	1 Bangunan	611.150.002
A	Misi 5: Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi													
B	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Investasi													
C	Sasaran : 1. Ketersediaan Lapangan Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	5		7		9		12		15		20	
	2. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	168 M		184,8 M		203,2 M		223,6 M		245,9 M		270,5 M	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	75%	350,000,000	80%	400,000,000	85%	450,000,000	90%	500,000,000	95%	500,000,000	100%	550,000,000
1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan & Insentif PM	60		65		70		75		80		85	

RENSTRA DPMPTSP KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Anggaran (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Daerah	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	150,000,000	1 dok	150,000,000	1 dok	150,000,000
1.1.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi	1 dok	50,000,000										
1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Persentase Peningkatan Perencanaan Pengembangan PM	60		65		70		75		80		85	
1.2.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen RUPM yang tersusun	1 Dok	50,000,000	1 Dok	100,000,000	1 Dok	150,000,000						
1.2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Jumlah updating data prospek investasi	1 dok	150,000,000	1 dok	150,000,000	1 dok	200,000,000						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal serta Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja. Dengan indikator sasaran nilai investasi, IKM pelayanan perizinan berusaha dan jumlah tenaga kerja badan usaha dan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya realisasi investasi, meningkatkan. Sedangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil seperti pada Tabel 7.1.

(Tabel T-C 28 dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DPMPTSP Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Realisasi Investasi PMDN	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	79,2

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Ternate yaitu Nilai Investasi baik PMDN (penanaman modal dalam negeri), PMA (penanaman modal asing) maupun Usaha Menengah dan Mikro (UMK) dan indeks kepuasan masyarakat. Indikator kinerja tersebut mempunyai target yang harus dicapai hingga tahun 2026.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Ternate yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 .

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Ternate.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Ternate .

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate harus ditingkatkan. Dari hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate di masa yang akan datang .

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate ini.